

**PENGARUH PEMANFAATAN TEKNOLOGI INFORMASI DAN
PENGAWASAN KEUANGAN DAERAH TERHADAP KUALITAS LAPORAN
KEUANGAN DAERAH**

(Studi Empiris pada SKPD Pemerintah kota padang)

ARTIKEL



Oleh :

**Irfan Ikhwanul Haza
2008/02220**

**PROGRAM STUDI AKUNTANSI
FAKULTAS EKONOMI
UNIVERSITAS NEGERI PADANG**

PENGARUH PEMANFAATAN TEKNOLOGI INFORMASI DAN PENGAWASAN KEUANGAN DAERAH TERHADAP KUALITAS LAPORAN KEUANGAN DAERAH

(Studi Empiris pada SKPD Pemerintah kota padang)

Irfan Ikhwanul Haza

Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Padang
Jl. Prof. Dr. Hamka Kampus Air Tawar Padang
Email : Irfanhaza08@gmail.com

ABSTRACT

This study aims to determine : (1) The effect of the use of technology on the quality of the financial statements of government , (2) Effect on the Quality Supervision local finance local government financial reports . The population in this study are all working units (SKPD) the City field. The sample in this study amounted to 45 SKPD . Data collection method used is by using a questionnaire . The analysis used is multiple regression analysis using SPSS version 22 .

The results showed that : (1) The information technology has a significant positive effect on the quality of local government financial report , (2) financial oversight daerahberpengaruh positive significant financial report quality of local government .

Keywords : Use of information technology , financial supervision area , quality of local government financial reports .

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui: (1) Pengaruh pemanfaatan teknologi terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah , (2) Pengaruh Pengawasan keuangan daerah terhadap Kualitas laporan keuangan pemerintah daerah.

Populasi dalam penelitian ini adalah seluruh Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) Kota padang. Sampel pada penelitian ini berjumlah 45 SKPD. Metode pengumpulan data yang digunakan adalah dengan menggunakan kuesioner. Analisis yang digunakan adalah analisis regresi berganda dengan bantuan SPSS versi 22.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa: (1) Pemanfaatan teknologi informasi berpengaruh signifikan positif terhadap Kualitas laporan keuangan pemerintah daerah, (2) Pengawasan keuangan daerahberpengaruh signifikan positif terhadap Kualitas laporan keuangan pemerintah daerah.

Kata Kunci: Pemanfaatan teknologi informasi, Pengawasan keuangan daerah, Kualitas laporan keuangan pemerintah daerah.

I. PENDAHULUAN

Sebagai salah satu bentuk pertanggung jawaban dalam penyelenggaraan pemerintahan yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara dan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, upaya konkrit untuk mewujudkan transparansi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan pemerintah, baik pemerintah pusat maupun pemerintah daerah adalah dengan menyampaikan laporan pertanggungjawaban berupa laporan keuangan. Laporan keuangan pemerintah kemudian disampaikan kepada DPR/DPRD dan masyarakat umum setelah diaudit oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK).

Laporan keuangan pemerintah yang dihasilkan harus memenuhi prinsip-prinsip tepat waktu dan disusun dengan mengikuti Standar Akuntansi Pemerintahan sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2005 yang telah digantikan dengan Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010. Pengelolaan keuangan pemerintah daerah harus dilakukan berdasarkan tata kelola pemerintahan yang baik (*good government governance*), yaitu pengelolaan keuangan yang dilakukan secara transparan dan akuntabel, yang memungkinkan para pemakai laporan keuangan untuk dapat mengakses informasi tentang hasil yang dicapai dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah.

Informasi harus bermanfaat bagi para pemakai. Informasi yang bermanfaat bagi para pemakai adalah informasi yang mempunyai nilai atau kualitas (Swardjono, 2005:165). Informasi akan bermanfaat apabila informasi tersebut dapat mendukung pengambilan keputusan dan dapat dipahami oleh para pemakai. Informasi akuntansi yang terdapat di dalam laporan keuangan pemerintah daerah harus mempunyai beberapa karakteristik kualitatif yang

disyaratkan. Karakteristik kualitatif laporan keuangan adalah ukuran-ukuran normatif yang perlu diwujudkan dalam informasi akuntansi sehingga dapat memenuhi tujuannya.

Adapun karakteristik kualitatif laporan keuangan pemerintah yang merupakan prasyarat normatif sebagaimana disebutkan dalam Rerangka Konseptual Akuntansi Pemerintah (Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010) adalah (1) relevan, (2) andal, (3) dapat dibandingkan, dan (4) dapat dipahami. Apabila informasi yang terdapat di dalam laporan keuangan pemerintah daerah memenuhi kriteria karakteristik kualitatif, berarti pemerintah daerah mampu mewujudkan transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan keuangan daerah.

Pemerintah pusat dan pemerintah daerah sudah seharusnya meningkatkan kualitas laporan keuangan yang mengandung informasi keuangan yang dibutuhkan berbagai pihak. Peningkatan kualitas laporan keuangan dimaksudkan agar dapat meningkatkan kredibilitasnya, menyajikan informasi yang lengkap dan sesuai dengan kebutuhan pemakai, dan pada gilirannya akan dapat mewujudkan transparansi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan pemerintah daerah.

Perkembangan teknologi informasi tidak hanya dimanfaatkan pada organisasi bisnis tetapi juga pada organisasi sektor publik, termasuk pemerintahan. Dalam Penjelasan Peraturan Pemerintah No. 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan disebutkan bahwa untuk menindaklanjuti terselenggaranya proses pembangunan yang sejalan dengan prinsip tata kelola pemerintahan yang baik pemerintah pusat dan pemerintah daerah berkewajiban untuk mengembangkan dan memanfaatkan kemajuan teknologi informasi untuk meningkatkan kemampuan mengelola keuangan, dan menyalurkan

informasi keuangan kepada pelayanan publik.

Pemerintah perlu mengoptimalkan pemanfaatan kemajuan teknologi informasi untuk membangun jaringan sistem informasi manajemen dan proses kerja yang memungkinkan pemerintahan bekerja secara terpadu dengan menyederhanakan akses antar unit kerja. Wilkinson et al., (2000) mengatakan pemanfaatan teknologi informasi mencakup adanya (a) pengolahan data, pengolahan informasi, sistem manajemen dan proses kerja secara elektronik dan (b) pemanfaatan kemajuan teknologi informasi agar pelayanan publik dapat diakses secara mudah dan murah oleh masyarakat.

Teknologi informasi selain sebagai teknologi komputer (*hardware* dan *software*) untuk pemrosesan dan penyimpanan informasi, juga berfungsi sebagai teknologi komunikasi untuk penyebaran informasi. Komputer sebagai salah satu komponen dari teknologi informasi merupakan alat yang bisa melipatgandakan kemampuan yang dimiliki manusia dan komputer juga bisa mengerjakan sesuatu yang manusia mungkin tidak mampu melakukannya. Pengolahan data menjadi suatu informasi dengan bantuan komputer jelas akan lebih meningkatkan nilai dari informasi yang dihasilkan (Wahana Komputer, 2003). Dalam hubungannya dengan sistem informasi akuntansi, komputer akan meningkatkan kapabilitas sistem. Ketika komputer dan komponen-komponen yang berhubungan dengan teknologi informasi diintegrasikan ke dalam suatu sistem informasi akuntansi, tidak ada aktivitas umum yang ditambah atau dikurangi.

Hal kedua yang mempengaruhi kualitas laporan keuangan pemerintah daerah adalah pengawasan keuangan daerah. Sistem akan berjalan baik apabila ada pengawasan yang memastikan sistem

berjalan sesuai dengan rencana, untuk mendukung kualitas laporan keuangan yang baik. Maka oleh sebab itu perlu adanya suatu pengawasan dalam pengelolaan anggaran daerah tersebut agar se-mua proses berjalan dengan baik sehingga dapat menghasilkan kualitas laporan keuangan yang baik (Mardiasmo, 2001 dalam Fikri, 2011).

Untuk menyajikan informasi keuangan yang handal kepada para pemakai agar sesuai dengan rencana yang ditetapkan, diperlukan media tertentu yang di-pandang relevan, yaitu pengawasan keuangan daerah (Tuasikal, 2007). Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 51 Tahun 2010 tentang Pedoman Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah Tahun 2011, yang di-maksud dengan pengawasan adalah proses kegiatan yang ditunjukkan untuk men-jamin agar pemerintah daerah berjalan secara efektif dan efisien sesuai dengan rencana dan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pengawasan diperlukan untuk mengetahui apakah perencanaan yang telah disusun dapat berjalan secara efisien, efektif, dan ekonomis. Pengawasan menurut Keputusan Presiden No. 74 tahun 2001 (Tentang Tata Cara Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah) Pasal (16) menyebutkan bahwa pengawasan pemerintah daerah adalah proses kegiatan yang ditujukan untuk menjamin agar pemerintah daerah berjalan sesuai dengan rencana dan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Apabila pengawasan telah dilakukan dengan baik, pengelolaan keuangan daerah akan berjalan sesuai rencana dan dapat menghasilkan kinerja keuangan yang baik yang akan terlihat pada laporan keuangan pemerintah daerah yang berkualitas.

Laporan keuangan Pemko Padang pada periode 2012 telah meraih Opini WTP dengan paragraf penjelas. Memberikan arti

masih adanya sejumlah cacatan yang harus ditindaklanjuti oleh pihak Pemko Padang. Peraturan menyatakan catatan tersebut harus ditindaklanjuti Pemko Padang dalam waktu 60 hari ke depan. Jika tidak, maka Pemko Padang terancam kena sanksi administrasi dan sanksi pidana. Diantara catatan tersebut adalah kewajiban Pemko Padang untuk segera menyetorkan ke kas daerah sisa dana sertifikasi guru Triwulan I yang terlanjur dibayarkan. Jumlahnya tidak kecil, mencapai Rp2,1 miliar. Catatan lainnya adalah masalah pengelolaan dana bergulir yang belum dilunasi. Pihak BPK mengingatkan agar kewajiban tersebut bisa segera dilunasi. BPK juga mencatat adanya salah penganggaran belanja modal di PU dan catatan tentang adanya pembayaran personil unsur Muspida yang membenani anggaran daerah (www.inilah.com, Kamis, 11 Juli 2013 01:37).

Berdasarkan hasil penelitian diatas, perlu dilakukan penelitian untuk mengetahui sejauhmana kualitas laporan keuangan yang dihasilkan oleh Pemerintah Kota Padang, bagaimanakah pengaruh penggunaan teknologi informasi dan pengawasan keuangan terhadap kualitas laporan keuangan tersebut. Alasan peneliti mengambil tempat penelitian di Kota Padang karena adanya masalah terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah Kota Padang, di mana Kota Padang yang merupakan Ibu Kota Provinsi menggunakan anggaran yang lebih besar dibandingkan dengan Kabupaten/Kota lainnya. Oleh sebab itu penelitian ini difokuskan pada **“Pengaruh Pemanfaatan Teknologi Informasi dan Pengawasan Keuangan Daerah terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah daerah (Studi Empiris Pada SKPD Kota Padang)”**.

Berdasarkan latar belakang masalah di atas, maka dapat dirumuskan masalah sebagai berikut:

1. Sejauhmana pengaruh pemanfaatan teknologi informasi terhadap kualitas laporan keuangan Pemerintah Kota Padang?
2. Sejauhmana pengaruh pengawasan keuangan daerah terhadap kualitas laporan keuangan Pemerintah Kota Padang?

Berdasarkan perumusan masalah di atas, maka penelitian ini dilakukan bertujuan untuk memperoleh bukti empiris:

1. Pengaruh pemanfaatan teknologi informasi terhadap kualitas laporan keuangan Pemerintah Kota Padang.
2. Pengaruh pengawasan keuangan daerah terhadap kualitas laporan keuangan Pemerintah Kota Padang.

Manfaat penelitian:

1. Penulis, dapat memberikan pengetahuan tentang pengaruh pemanfaatan teknologi informasi dan pengawasan keuangan daerah terhadap kualitas laporan keuangan Pemerintah Kota Padang.
2. Pemerintah Kota Padang, dapat menjadi masukan dalam peningkatan kualitas laporan keuangan pemerintah daerah.
3. Akademisi, menambah suatu bukti empiris dan ilmu pengetahuan dalam bidang akuntansi sektor publik.

II. TELAHAH LITERATUR DAN PENGEMBANGAN HIPOTESIS

1. Pengertian Laporan Keuangan

Laporan keuangan merupakan bentuk pertanggungjawaban atas ke-pengurusan sumber daya ekonomi yang dimiliki oleh suatu entitas. Laporan keuangan yang diterbitkan harus disusun berdasarkan standar akuntansi yang ber-laku agar laporan keuangan tersebut dapat dibandingkan dengan laporan keuangan periode sebelumnya atau dibandingkan dengan laporan keuangan entitas lain.

Menurut Peraturan Pemerintah (PP) No 24 Tahun 2005 Tentang Standar

Akuntansi Pemerintah, laporan keuangan merupakan laporan terstruktur mengenai laporan posisi keuangan dan transaksi-transaksi yang dilakukan oleh suatu entitas pelaporan. Dalam Peraturan Pemerintah No 8 Tahun 2006, Tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah, menyatakan bahwa Laporan Keuangan adalah bentuk pertanggungjawaban pengelolaan keuangan Negara dan Daerah selama suatu periode. Sedangkan Bastian (2006:247) mendefinisikan laporan keuangan adalah representasi posisi keuangan dari transaksi-transaksi yang dilakukan suatu entitas.

Dari defenisi-defenisi di atas dapat disimpulkan bahwa laporan keuangan berkualitas adalah apabila informasi yang disajikan dalam laporan keuangan tersebut dapat dipahami, memenuhi kebutuhan pemakainya dalam pengambilan keputusan, bebas dari pengertian yang menyesatkan dan kesalahan material, serta dapat diandalkan. Laporan keuangan yang berkualitas akan dapat dibandingkan dengan periode-periode sebelumnya. Dengan demikian upaya meningkatkan kualitas laporan keuangan berarti usaha untuk meningkatkan kredibilitasnya, dan pada gilirannya akan dapat mewujudkan transparansi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan pemerintah daerah.

Kualitas laporan keuangan dapat dikatakan baik adalah apabila informasi yang disajikan dalam laporan keuangan tersebut dapat dipahami, dan memenuhi kebutuhan pemakainya dalam pengambilan keputusan, bebas dari pengertian yang menyesatkan, kesalahan material serta dapat diandalkan, sehingga laporan keuangan tersebut dapat dibandingkan dengan periode-periode sebelumnya. Namun demikian, perlu disadari bahwa laporan keuangan tidak menyediakan semua informasi yang mungkin dibutuhkan pengguna dalam pengambilan keputusan ekonomi. Secara

umum, laporan keuangan menggambarkan pengaruh dari kejadian-an masa lalu, dan tidak diwajibkan untuk menyediakan informasi non keuangan.

Menurut Soewardjono (2005), merumuskan kualitas spesifik pelaporan keuangan dalam dua kategori yaitu kualitas primer beserta unsur-unsurnya dan sekunder. Kualitas primer terdiri atas kerelevanan atau keberpautan atau relevansi (*relevance*) dan keterandalan atau reliabilitas (*reliability*), dan ketepatan penyimbolan (*representational faithfulness*). Unsur keberpautan adalah nilai prediktif, nilai balikan, dan ketepatwaktuan. Sedangkan unsur keterandalan adalah keterujian atau verifikasiabilitas (*verifiability*). Kualitas sekunder adalah keterbanding-an (*comparability*), ketaatasasan atau konsistensi (*consistency*) dan kenetralan atau netralitas (*neutrality*).

Jonas dan Blanchet (2000) dalam Bramasta (2012), menambahkan bahwa informasi keuangan yang bermanfaat dalam pengambilan keputusan selain relevan dan andal adalah juga memiliki kejelasan (*clarity*) dalam arti dapat dimengerti atau dipahami.

Dalam PP Nomor 71 tahun 2010, kualitas laporan keuangan tersebut dapat dilihat dari karakteristik kualitatif laporan keuangan tersebut. Karakteristik kualitatif laporan keuangan adalah ukuran-ukuran normatif yang perlu diwujudkan dalam informasi akuntansi sehingga dapat memenuhi tujuannya. Keempat karakteristik tersebut hampir sama dengan karakteristik laporan keuangan yang tercantum dalam PSAK tahun 2004.

2. Pemanfaatan Teknologi Informasi

Teknologi informasi selain sebagai teknologi komputer (*hardware* dan *software*) untuk pemrosesan dan penyimpanan informasi, juga berfungsi sebagai teknologi komunikasi untuk penyebaran informasi. Teknologi informasi meliputi komputer (*mainframe, mini,*

micro), perangkat lunak (*software*), *database*, jaringan (*internet, internet*), *electronic commerce*, dan jenis lainnya yang berhubungan dengan teknologi (Wilkinson *et al.*, 2000 dalam Arfianti, 2011).

Komputer sebagai salah satu komponen dari teknologi informasi merupakan alat yang bisa melipatgandakan kemampuan yang dimiliki manusia dan komputer juga bisa mengerjakan sesuatu yang manusia mungkin tidak mampu melakukannya. Pengolahan data menjadi suatu informasi dengan bantuan komputer jelas akan lebih meningkatkan nilai dari informasi yang dihasilkan (Wahana Komputer, 2003). Dalam hubungannya dengan sistem informasi akuntansi, komputer akan meningkatkan kapabilitas sistem. Ketika komputer dan komponen-komponen yang berhubungan dengan teknologi informasi diintegrasikan ke dalam suatu sistem informasi akuntansi, tidak ada aktivitas umum yang ditambah atau dikurangi.

Pemanfaatan TI dalam akuntansi Menurut Jurnal dan Supomo (2002) dalam Harifan (2009), teknologi informasi bermanfaat dalam pelaksanaan tugas-tugas akuntansi tetapi beberapa hal berikut ini pula menjadi perhatian :

- 1) Bagian akuntansi/keuangan memiliki komputer yang cukup untuk melaksanakan tugas
- 2) Jaringan internet telah terpasang di unit kerja
- 3) Jaringan komputer telah dimanfaatkan sebagai penghubung antar unit kerja dalam pengiriman data dan informasi yang dibutuhkan
- 4) Proses akuntansi sejak awal transaksi hingga pembuatan laporan keuangan dilakukan secara komputerisasi
- 5) Pengolahan data transaksi keuangan menggunakan *software* yang sesuai dengan peraturan perundang-undangan

- 6) Laporan akuntansi dan manajerial dihasilkan dari sistem yang terintegrasi
- 7) Adanya jadwal pemeliharaan peralatan secara teratur
- 8) Peralatan yang usang atau rusak di data dan diperbaiki tepat pada waktunya

3. Pengawasan Keuangan Daerah

Dalam rangka pelaksanaan wewenang pemerintah daerah sebagaimana yang ditetapkan dalam Undang-Undang Nomor 32 tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah yang diikuti dengan perimbangan keuangan antara pemerintah pusat dan daerah sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 33 tahun 2004 timbul kewajiban pemerintah yang perlu mengelola keuangan daerah dengan baik, khususnya anggaran daerah dan realisasinya yang akan disajikan dalam APBD dan juga laporan realisasi anggaran pada laporan keuangan pemerintah daerah. Maka, oleh sebab itu perlu adanya suatu pengawasan dalam pengelolaan anggaran daerah tersebut (Mardiasmo, 2001).

Asas-asas umum pengelolaan keuangan daerah yang mengikat pemerintah daerah sebagai pengelola keuangan daerah. Keuangan daerah harus dikelola dengan berdasarkan pada prinsip tertib, taat pada peraturan perundang-undangan, efisien, ekonomis, efektif, transparan dan bertanggungjawab.

Pengawasan diperlukan untuk mengetahui apakah perencanaan yang telah disusun dapat berjalan secara efisien, efektif, dan ekonomis. Pengawasan menurut Keputusan Presiden No. 74 tahun 2001 (Tentang Tata Cara Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah) Pasal (16) menyebutkan bahwa pengawasan pemerintah daerah adalah proses kegiatan yang ditujukan untuk menjamin agar pemerintah daerah berjalan sesuai dengan

rencana dan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Berdasarkan PP No.41 tahun 2007 tentang perangkat daerah menjelaskan bahwa inspektorat daerah merupakan unsur pengawas penyelenggara pemerintah daerah yang melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan urusan pemerintah di daerah kabupaten/kota. Salah satu urusan pemerintahan adalah pengelolaan keuangan daerah.

Penelitian Terdahulu

Hasil penelitian Penelitian Arfianti (2011) menemukan bahwa laporan keuangan yang dihasilkan oleh pemerintah daerah masih belum memenuhi kriteria nilai informasi yang disyaratkan, diantaranya keandalan dan ketepatanwaktuan. Mengingat bahwa keandalan dan ketepatanwaktuan merupakan unsur penting dalam Laporan Keuangan Pemerintah Daerah sebagai dasar pengambilan keputusan. Pengawasan merupakan upaya untuk mengenali penyimpangan atau hambatan dalam pengelolaan keuangan pemerintah daerah. Bila ternyata ke-mudian ditemukan adanya penyimpangan atau hambatan, diharapkan akan dapat segera dideteksi atau diambil tindakan koreksi, sehingga informasi keuangan dapat segera digunakan oleh pemakai, dan pengelolaan keuangan pemerintah daerah dapat berjalan secara maksimal. Pengawasan keuangan daerah pemerintah juga menentukan kualitas laporan keuangan yang baik.

Penelitian yang dilakukan oleh Indriasari (2008) yang meneliti Pemerintah Kota Palembang dan Kabupaten Ogan Ilir, menyimpulkan bahwa keterandalan pelaporan keuangan pemerintah daerah dipengaruhi oleh pemanfaatan teknologi informasi dan pengendalian intern akuntansi. Sedangkan ketepatanwaktuan pelaporan keuangan pemerintah daerah dipengaruhi

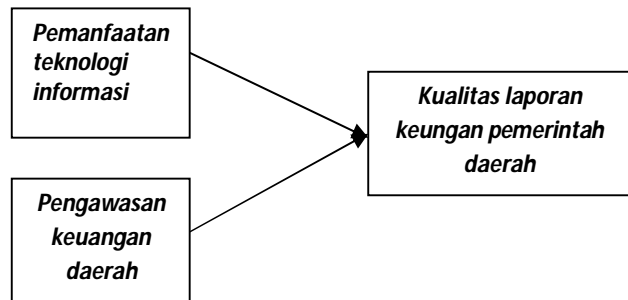
oleh kapasitas sumber daya manusia dan pemanfaatan teknologi informasi.

Tuasikal (2007) menyimpulkan secara parsial pengawasan eksternal serta pemahaman mengenai sistem akuntansi keuangan daerah tidak berpengaruh terhadap kinerja unit satuan kerja pemerintah daerah. Namun secara simultan pengawasan internal dan eksternal, dan pemahaman mengenai sistem akuntansi, serta pengelolaan keuangan berpengaruh relatif rendah terhadap kinerja unit satuan kerja pemerintah daerah.

Penelitian yang dilakukan Winidyaningrum (2010), menemukan bukti empiris bahwa pada Pemda SUBOSUKAWONOSRATEN, Pemanfaatan teknologi informasi dalam pengolahan data memiliki keunggulan dari sisi kecepatan sehingga menghasilkan laporan keuangan yang tepat waktu.

Kerangka Konseptual

Kerangka konseptual dimaksudkan sebagai konsep untuk menjelaskan mengungkapkan keterkaitan antara variabel yang akan diteliti berdasarkan batasan dan rumusan masalah. Berdasarkan latar belakang dan kajian teori yang telah dikemukakan di atas dapat dijelaskan bahwa untuk meningkatkan kualitas laporan keuangan pemerintah daerah, diperlukan pemanfaatan kemajuan teknologi informasi dan penerapan pengawasan keuangan pada Pemerintah Kota Padang. Suatu laporan keuangan itu berkualitas dan bermanfaat bagi sejumlah besar pengguna apabila informasi yang disajikan dalam laporan keuangan tersebut dapat dipahami, relevan, andal, dan dapat diperbandingkan. Untuk lebih menyederhanakan kerangka pemikiran tersebut, maka dibuatlah kerangka konseptual seperti yang terlihat pada gambar di bawah ini:



III. METODE PENELITIAN

Jenis Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah dan tujuan yang telah dijelaskan, maka penelitian ini tergolong penelitian *kausalitatif*. Penelitian ini menjelaskan dan melihat pengaruh penggunaan teknologi informasi dan pengawasan keuangan terhadap kualitas laporan keuangan.

Populasi dan Sampel

Populasi dalam penelitian ini adalah Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) yang ada di Kota Padang. Berdasarkan data yang diperoleh dari BPS Pemerintah Kota Padang jumlah Satuan Kerja yang terdapat berjumlah 45 SKPD yang terdiri dari Dinas, Badan, Kantor, Kecamatan, dan Inspektorat. Sampel merupakan sebagian subyek yang dapat mewakili populasi. Penelitian ini menggunakan *total sampling* dikarenakan populasinya kurang dari 100 subyek

Jenis dan Sumber Data

Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data subjek. Data berupa tanggapan tertulis atas pertanyaan atau kuesioner dari subjek penelitian pada instansi pemerintah daerah. Sumber data dalam penelitian ini adalah data primer. Data tersebut di-peroleh secara langsung dari instansi pemerintah daerah dengan menggunakan daftar pertanyaan dalam bentuk kuesioner guna mengumpulkan informasi dari objek penelitian tersebut.

Metode Pengumpulan Data

Data untuk penelitian ini dikumpulkan dengan cara menyebarkan kuesioner kepada populasi dalam penelitian ini. Kuesioner diberikan secara langsung ke alamat responden. Pengembalian kuesioner dijemput langsung ke instansi pemerintah sesuai kesepakatan pengembalian

Variabel Penelitian

Variabel yang digunakan dalam penelitian ini terdiri atas dua variabel antara lain:

a. Variabel Terikat (Y)

Menurut Kuncoro (2003:26) variabel terikat (*dependent variable*) adalah variabel yang menjadi perhatian utama dalam sebuah pengamatan. Pengamatan akan dapat mendeteksi ataupun menerangkan variabel dalam variabel terikat beserta perubahannya yang terjadi kemudian. Variabel terikat (*dependent variable*) dalam penelitian ini adalah Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah.

b. Variabel Bebas (X)

Variabel bebas (*independent variable*) adalah variabel yang dapat mempengaruhi perubahan dalam variabel terikat (*dependent variable*) dan mempunyai pengaruh positif ataupun negatif bagi variabel terikat nantinya. Dalam penelitian ini yang menjadi variabel bebas (*independent variable*) adalah:

1. Pemanfaatan Teknologi Informasi (X_1)
2. Pengawasan Keuangan Daerah (X_2)

Pengukuran Variabel

Pengukuran variabel dalam penelitian ini menggunakan skala likert dengan lima alternatif jawaban masing-masing diberi skor yaitu : Selalu (SL), Sering (SR), Kadang-kadang (KK), Jarang (JR), Tidak Pernah (TP).

Instrumen Penelitian

Instrumen penelitian merupakan alat yang digunakan untuk mengukur variabel dalam rangka mengumpulkan data.

Instrumen penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah kuesioner.

Pengujian Kualitas Data

1. Uji Validitas

Uji validitas ini menggambarkan bahwa pertanyaan yang digunakan mampu untuk mengungkapkan sesuatu yang akan diukur (*valid*). Uji validitas dilakukan dengan menyebarkan minimal 30 kuesioner kepada mahasiswa jurusan Akuntansi Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Padang yang memiliki konsentrasi Akuntansi Sektor Publik.

2. Uji Reliabilitas

Kuesioner dikatakan reliabel (andal) jika jawaban seseorang terhadap pernyataan adalah konsisten atau stabil dari waktu ke waktu (Imam, 2009). Instrumen dipercaya jika jawaban dari responden atas pertanyaan yang ada konsisten atau stabil dari waktu ke waktu.

Uji Asumsi Klasik

1) Uji Normalitas Residual

Uji normalitas dapat dilakukan dengan metode *kolmogorov smirnov*, dengan melihat signifikan pada 0,05. Jika nilai signifikan yang dihasilkan >0,05 maka akan berdistribusi normal.

2) Uji Multikolinearitas

Multikolinearitas adalah situasi adanya korelasi variabel-variabel bebas antara satu dengan yang lain, maka salah satu variabel bebas tersebut dieliminir. Untuk menguji adanya multikolinearitas dilakukan dengan melihat nilai VIF (*Variances Inflating Factor*) kecil dari 10 dan tolerance besar dari 0,10.

Teknik Analisis Data

Data yang dikumpulkan dalam penelitian ini selanjutnya dianalisis dengan langkah-langkah sebagai berikut:

1. Analisis Deskriptif

1. Menghitung frekuensi dari jawaban yang diberikan responden atas setiap item yang ditanyakan
2. Menghitung rata-rata skor total item dengan menggunakan rumus (Sugiono,2004:74)
3. Menghitung nilai rerata jawaban responden
4. Menghitung nilai TCR masing-masing kategori jawaban dari deskripsi variabel

Nilai persentase dimasukan kedalam kriteria sebagai berikut:

- a. Interval jawaban responden 76%-100% kategori jawabannya baik
- b. Interval jawaban responden 56-75% kategori jawabannya cukup baik
- c. Interval jawaban responden <56% kategori jawabannya kurang baik.

2. Metode Analisis Data

a. Uji Regresi Berganda

Alat uji yang digunakan adalah *Regresi Linear Berganda*. Uji digunakan karena penelitian ini menggunakan lebih dari satu variabel bebas dan satu variabel terikat. Untuk mengetahui peparuh variabel independen terhadap variabel dependen digunakan model regresi berganda dengan persamaan sebagai berikut:

$$Y = a + b_1 X_1 + b_2 X_2 + e$$

Dimana :

Y = Kualita laporan keuangan pemerintah daerah

B₁₂= Koefisien regresi dari variable independen

X₁ = Pemanfaatan teknologi informasi

X₂ = Pengawasan keuangan daerah

a = constant

e = *erorr term*

b. Uji Koefisien Determinasi

Pengujian koefisien determinasi (R²) pada intinya adalah untuk mengukur seberapa jauh kemampuan model dalam

menerangkan variasi variabel dependen. Koefisien determinasi berkisar dari nol sampai dengan satu ($0 \leq R^2 \leq 1$). Hal ini berarti bila $R^2 = 0$ menunjukkan tidak adanya pengaruh antara variabel independen terhadap variabel dependen, bila R^2 semakin besar terhadap variabel dependen dan bila R^2 semakin kecil mendekati nol maka dapat dikatakan semakin kecilnya pengaruh variabel independen terhadap variabel dependen.

3. Uji Hipotesis

a. Uji F

Uji F dilakukan untuk menguji apakah secara serentak variabel independen mampu menjelaskan variabel dependen secara baik atau untuk menguji apakah model yang digunakan telah *fix* atau tidak, nilai sig $0,000^a < 0.05$ menunjukkan bahwa variabel independen secara bersama-sama memberikan pengaruh yang signifikan terhadap variabel dependen. Ini berarti model *fix* digunakan untuk uji t statistic yang menguji variabel independen secara parsial terhadap variabel dependen.

b. Uji t (t-test)

Uji T dilakukan untuk mengetahui pengaruh variabel independen terhadap variabel dependen dalam persamaan regresi berganda secara parsial. Uji t juga dilakukan untuk menguji kebenaran koefisien regresi dan melihat apakah koefisien regresi yang diperoleh signifikan atau tidak. Untuk melihat adanya pengaruh variabel independen terhadap variabel dependen, diuji pada tingkat signifikan $\beta = 0,05$ kesimpulan hipotesis yang disajikan untuk H_1, H_2, H_3, H_4 didasarkan atas:

1. Jika tingkat signifikansi $\leq \beta = 0,05$ maka tersedia bukti yang cukup untuk menerima hipotesis H_1 dengan demikian dapat dikatakan pengelolaan keuangan berpengaruh

terhadap Akuntabilitas kinerja instansi pemerintah.

2. Jika tingkat signifikansi $\geq \beta = 0,05$ maka hipotesis H_1 s.d H_2 ditolak dengan demikian dapat dikatakan pengelolaan keuangan tidak berpengaruh terhadap Akuntabilitas kinerja instansi pemerintah.

Definisi Operasional

1. Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah

Dalam PP Nomor 71 tahun 2010, kualitas laporan keuangan tersebut dapat dilihat dari karakteristik kualitatif laporan keuangan tersebut. Karakteristik kualitatif laporan keuangan adalah ukuran-ukuran normatif yang perlu diwujudkan dalam informasi akuntansi sehingga dapat memenuhi tujuannya. Adapun karakteristik kualitatif laporan keuangan pemerintah yaitu: relevan, andal, dapat dibandingkan, dan dapat dipahami.

2. Pemanfaatan Teknologi Informasi

Pemanfaatan teknologi informasi merupakan penggunaan secara optimal dari komputer (*mainframe, mini, micro*), perangkat lunak (*software*), *database*, jaringan (*internet, intranet*), *electronic commerce*, dan jenis lainnya yang berhubungan dengan teknologi.

3. Pengawasan Keuangan Daerah

Pengawasan keuangan daerah merupakan proses kegiatan yang ditujukan untuk menjamin agar pemerintahan daerah berjalan secara efektif dan efisien sesuai dengan rencana dan ketentuan peraturan perundang-undangan.

IV. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Sampel dan Responden Penelitian

Jumlah populasi sasaran atau sampel pada penelitian ini adalah empat puluh lima Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) di lingkungan Pemerintah Kota Padang. Setiap

sampel masing-masing terdiri dari dua responden. Dari empat puluh lima sampel tersebut, disebarkan sebanyak 82 kuesioner. Hingga batas akhir pengumpulan data, kuisisioner yang diterima kembali sebanyak 75 kuesioner. Dengan demikian kuesioner yang dapat diolah adalah sebanyak 75 kuesioner

Uji Validitas dan Reliabilitas

1. Uji Validitas

Untuk melihat validitas dari masing-masing item kuesioner, di-gunakan Corrected Item-Total Colleration. Jika $r_{hitung} > r_{tabel}$, maka data dikatakan valid, dimana r_{tabel} untuk $N = 75$, adalah 1,667. Berdasarkan hasil pengolahan data didapatkan bahwa nilai *Corrected Item-Total Colleration* untuk masing-masing item variabel X_1 , X_2 , dan Y semuanya di atas r_{tabel} . Jika dapat dikatakan bahwa seluruh item pernyataan variabel X_1 , X_2 , dan Y adalah valid nilai terkecil dari *Corrected Item-Total Correlation* untuk masing-masing instrumen. Untuk instrumen Pemanfaatan teknologi informasi diketahui nilai *Corrected Item-Total Correlation* terkecil 0,262. Pengawasan keuangan daerah diketahui nilai *Corrected Item-Total Correlation* terkecil 0,490 Dan untuk kualitas laporan ke-uangan pemerintah daerah dengan nilai terkecil sebesar 0,3402.

2. Uji Reliabilitas

Untuk uji reliabilitas intrumen, semakin dekat koefisien keandalan dengan 1,0 maka akan semakin baik. Secara umum, keandalan kurang dari 0,60 dianggap buruk, keandalan dalam kisaran 0,7 bisa diterima, dan lebih dari 0,80 adalah baik (Sekaran, 2006:182) Keandalan konsistensi antar item atau koefisien keandalan Cronbach's Alpha yang terdapat pada Tabel di atas yaitu untuk instrumen pemanfaatan teknologi informasi 0,610 dan pengawasan keuangan daerah 0,89 Sedangkan untuk instrumen kualitas laporan keuangan pemerintah daerah 0,608.

Data ini menunjukkan nilai yang berada pada kisaran di atas 0,60. Dengan demikian semua instrumen penelitian dapat dikatakan reliabel.

Uji Asumsi Klasik

1. Uji Normalitas Residual

Uji normalitas bertujuan untuk menguji apakah dalam sebuah regresi, variabel pengganggu atau residual memiliki distribusi normal. Pengujian normalitas dapat dilakukan dengan menggunakan *One Sample Kolmogorov-Smirnov Test*, dengan taraf signifikan 0,05 atau 5%. Jika signifikan yang dihasilkan $> 0,05$ maka distribusi datanya dikatakan normal. Sebaliknya jika signifikan yang dihasilkan $< 0,05$ maka data tidak terdistribusi secara normal. hasil uji normalitas menyatakan nilai *Test Statistic* sebesar 0,074 dengan signifikan 0,200. berdasarkan hasil tersebut dapat dinyatakan data yang digunakan dalam penelitian ini telah berdistribusi normal dan bisa dilanjutkan untuk diteliti lebih lanjut, karena nilai signifikan dari uji normalitas $> 0,05$. untuk keterangan lebih lanjut dapat dilihat Histogram dan normal *P-Plot* data yang telah terdistribusi normal pada lampiran.

2. Uji Multikolinearitas

Untuk menguji tidak adanya multikolinearitas dapat dilihat melalui *Variance Inflation factor (VIF) < 10* dan *tolerance > 0,10*. Variabel Pemanfaatan Teknologi Informasi (X_1) dan Pengawasan Keuangan Daerah (X_2) dengan nilai VIF 1,000 adalah nilai VIF yang kecil dari 10, dan nilai *tolerance* adalah 0,999 $> 0,1$. Dengan demikian dapat dikatakan bahwa tidak terdapat korelasi antara sesama variabel bebas dalam model regresi dan dapat disimpulkan bahwa dalam penelitian ini tidak terdapat masalah multikolinearitas diantara sesama variabel bebas dalam model regresi yang dibentuk.

3. Uji Heterokedastisitas

Hasil uji normalitas residual dari pengolahan SPSS dapat diketahui dengan melihat nilai signifikansi dari hasil uji *gletser*. Uji *Gletser* dilakukan untuk menguji apakah dalam sebuah model regresi terjadi ketidaksamaan varians dari residual atas satu pengamatan ke pengamatan yang lain, dengan melihat nilai sig. > 0,05. Dari analisis data diperoleh hasil bahwa tidak terdapat gejala heterokedastisitas..

Pengujian Model

1. Uji F

Untuk mengetahui pengaruh secara bersama-sama variabel independen terhadap variabel dependen dapat dilihat dari hasil uji regresi berganda, seperti dapat dilihat pada tabel 20 dibawah ini:

Uji F dilakukan untuk menguji apakah secara serentak variabel independen mampu menjelaskan variabel dependen secara baik atau untuk menguji apakah model yang digunakan telah *fix* atau tidak. Pengaruh secara bersama-sama variabel independen terhadap variabel dependen dilakukan dengan cara membandingkan F_{hitung} dengan F_{tabel} . Nilai F_{tabel} pada level signifikansi 0,05 adalah 2,40 Hasil pengolahan statistik analisis regresi menunjukkan nilai $F = 20,065$ yang signifikan pada level 0,000. Jadi $F_{hitung} > F_{tabel}$ yaitu $20,065 > 2,40$ dengan nilai signifikansi sebesar $0,000 < 0,05$. karena nilai signifikansi jauh lebih kecil dari 0,05 maka model regresi yang digunakan sudah *fix*, sehingga dapat digunakan untuk memprediksi variabel-variabel penelitian. Dari hasil pengujian juga dapat disimpulkan bahwa pemanfaatan teknologi informasi dan pengawasan keuangan daerah secara bersama-sama atau secara silmutan berpengaruh signifikan terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah.

2. Koefesien Determinasi (*R square*)

Nilai *Adjusted R Square* adalah 0,340. Hal ini mengindikasikan bahwa kontribusi variabel pemanfaatan teknologi informasi dan pengawasan keuangan daerah terhadap variabel terikat yaitu kualitas laporan keuangan pemerintah daerah adalah sebesar 34%, sedangkan 66% ditentukan oleh faktor lain diluar model yang tidak terdektesi dalam penelitian ini.

3. Koefisien Regresi

Koefisien regresi berganda dilakukan dengan membandingkan t_{hitung} dengan t_{tabel} dan nilai sig dengan α yang diajukan yaitu 95% atau $\alpha = 0,05$.

$$Y = 21,792 + 0,470 X_1 + 0,146 X_2$$

Dimana :

a = Konstansta

b_1, b_2 = Koefesien regresi dari masing masing variabel

X_1 = Pemanfaatan teknologi informasi

X_2 = Pengawasan keuangan daerah

Y = kualitas Laporan keuangan pemerintah daerah

Dari persamaan di atas dapat dijelaskan bahwa:

- Nilai konstanta yang diperoleh sebesar 21,792 mengindikasikan bahwa jika variabel independen yaitu pemanfaatan teknologi informasi dan pengawasan keuangan daerah adalah nol maka nilai pengaruh kualitas laporan keuangan pemerintah daerah adalah sebesar konstansta 21,792
- Nilai koefisien variabel X_1 yaitu pemanfaatan teknologi informasi sebesar 0,470 mengindikasikan bahwa setiap peningkatan pemanfaatan teknologi informasi satu satuan akan mengakibatkan peningkatan kualitas laporan keuangan pemerintah daerah

sebesar 0,470 satuan. Nilai koefisien β dari variabel X_1 bernilai positif 0,470.

- c. Nilai koefisien variabel X_2 yaitu pengawasan keuangan daerah sebesar 0,146 mengindikasikan bahwa setiap peningkatan pengawasan keuangan daerah satu satuan akan mengakibatkan peningkatan kualitas laporan keuangan pemerintah daerah sebesar 0,146 satuan. Nilai koefisien β dari variabel X_2 bernilai positif yaitu 0,146

Uji Hipotesis (Uji t)

Uji t statistik (*t-Test*) bertujuan untuk mengetahui hubungan yang signifikan dari masing-masing variabel bebas terhadap variabel terikatnya. Pengujian hipotesis secara parsial dilakukan dengan cara membandingkan nilai t_{hitung} dengan nilai t_{tabel} . Nilai t_{tabel} dengan $\alpha = 0,05$ dan derajat bebas (db) = $n-k-1 = 75-2-1 = 72$ adalah 1,667. .

1. Pengujian Hipotesis 1

Pengujian hipotesis 1 dilakukan dengan membandingkan nilai t_{hitung} dan t_{tabel} . Hipotesis diterima jika $t_{hitung} > t_{tabel}$ dan nilai $sig < \alpha 0,05$. Nilai t_{tabel} pada $\alpha = 0,05$ adalah 1,667. Untuk variabel pemanfaatan teknologi informasi (X_1) nilai t_{hitung} adalah 6,008 dan nilai sig adalah 0,000. Dengan demikian dapat dikatakan bahwa $t_{hitung} > t_{tabel}$, yaitu **6,008 > 1,667** dan nilai signifikansi $0,000 < \alpha 0,05$. Hal ini menunjukkan bahwa pemanfaatan teknologi informasi (X_1) berpengaruh signifikan dan positif terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah. Sehingga hipotesis pertama dalam penelitian ini diterima.

2. Pengujian Hipotesis 2

Pengujian hipotesis 2 dilakukan dengan membandingkan nilai t_{hitung} dan t_{tabel} . Hipotesis diterima jika $t_{hitung} > t_{tabel}$ dan nilai $sig < \alpha 0,05$. Nilai t_{tabel} pada $\alpha = 0,05$ adalah 1,667. Untuk variabel pengawasan keuangan

daerah (X_2) nilai t_{hitung} adalah 2,094 dan nilai sig adalah 0,040. Dengan demikian dapat dikatakan bahwa $t_{hitung} > t_{tabel}$, yaitu $2,094 > 1,667$ dan nilai signifikansi $0,040 < \alpha 0,05$. Hal ini menunjukkan pengawasan keuangan daerah (X_2) berpengaruh signifikan dan positif terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah. Sehingga hipotesis kedua dalam penelitian ini diterima.

Pembahasan

1. Pengaruh pemanfaatan teknologi informasi terhadap Kualitas laporan keuangan pemerintah daerah

Dari hasil pengujian hipotesis, ditemukan adanya bukti yang menunjukkan bahwa terdapat pengaruh yang signifikan antara pemanfaatan teknologi informasi dengan kualitas laporan keuangan pemerintah daerah dan hubungannya positif. Pengaruh antara pemanfaatan teknologi informasi dengan kualitas laporan keuangan pemerintah daerah adalah semakin besar pemanfaatan teknologi informasi maka nilai kualitas laporan keuangan yang dihasilkan pemerintah akan semakin baik pula.

Hasil penelitian ini sejalan dengan teori yang dinyatakan oleh Jogiyanto, 1995 (dalam Harifan, 2009), menjelaskan bahwa informasi yang tepat waktu yang merupakan bagian dari nilai informasi (keter-pahaman) dapat dicapai dengan peran komponen teknologi. Penelitian ini juga sejalan dengan penelitian Indriasari (2008), menyatakan bahwa pemanfaatan teknologi informasi berpengaruh signifikan positif terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah. Teknologi informasi dapat dimanfaatkan jika jumlah kuantitas dan kualitasnya baik,serta tersedianya sarana penunjang yang dibutuhkan (seperti, jaringan dan *software*).

Dapat dilihat dari data distribusi frekuensi skor variabel pada tabel 11, variabel pemanfaatan teknologi informasi,

dimana tingkat capaian responden rata-rata untuk variabel pemanfaatan teknologi informasi berada pada kategori baik, dari penelitian ini ada item pernyataan yang TCRnya rendah yang perlu ditingkatkan SKPD Kota Padang, yaitu sebesar 50,66%, dimana pernyataannya “Pengolahan data transaksi keuangan menggunakan *software* yang sesuai dengan peraturan perundang-undangan”. Hal ini menunjukkan bahwa SKPD di dalam mengolah data transaksi keuangan menggunakan *software* yang sesuai dengan peraturan perundang-undangan yaitu Sistem Akuntansi Keuangan Daerah (SAKD).

2. Pengaruh Pengawasan keuangan daerah terhadap kualitas laporan keuangan daerah

Dari hasil pengujian hipotesis, ditemukan adanya bukti yang menunjukkan bahwa terdapat pengaruh yang signifikan antara pengawasan keuangan daerah dengan kualitas laporan keuangan pemerintah daerah dan hubungannya positif. Pengaruh antara pengawasan keuangan daerah dengan kualitas laporan keuangan pemerintah daerah adalah semakin baik pengawasan keuangan daerah maka kualitas dari laporan keuangan yang dihasilkan pemerintah akan semakin baik pula.

Sistem akan berjalan baik apabila ada pengawasan yang memastikan sistem berjalan sesuai dengan rencana, untuk mendukung kualitas laporan keuangan yang baik. Maka oleh sebab itu perlu adanya suatu pengawasan dalam pengelolaan anggaran daerah tersebut agar semua proses berjalan dengan baik sehingga dapat menghasilkan kualitas laporan keuangan yang baik (Mardiasmo, 2001 dalam Fikri, 2011). Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian Fikri (2011), pengawasan keuangan daerah berpengaruh signifikan positif terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah.

Dapat dilihat dari data distribusi frekuensi skor variabel pada tabel 12, variabel pengawasan keuangan daerah, dimana tingkat capaian responden rata-rata untuk variabel pengawasan keuangan daerah berada pada kategori baik, dari penelitian ini ada item pernyataan yang TCRnya rendah yang perlu ditingkatkan SKPD Kota Padang, yaitu sebesar 81,06%, dimana pernyataannya “Penyusunan APBD sesuai dengan perencanaan daerah”. Hal ini menunjukkan bahwa di dalam menyusun APBD ada beberapa faktor yang harus diperhatikan yaitu salah satunya perencanaan daerah. Jika dalam menyusun APBD tidak memperhatikan perencanaan daerah maka anggaran yang akan digunakan tidak akan mencapai target yang telah ditetapkan bersama. Pengawasan diperlukan untuk mengetahui apakah perencanaan yang telah disusun dapat berjalan secara efisien, efektif, dan ekonomis. Dapat disimpulkan bahwa pengawasan keuangan daerah pada SKPD Kota Padang sudah berjalan dengan baik.

PENUTUP

Kesimpulan

Kesimpulan yang dapat diambil dari penelitian ini mengenai Pengaruh pemanfaatan teknologi informasi dan pengawasan keuangan daerah terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah kota Padang adalah sebagai berikut:

1. Pemanfaatan teknologi informasi berpengaruh signifikan positif terhadap kualitas laporan keuangan pada pemerintah daerah kota Padang. Di mana, semakin baik pemanfaatan teknologi informasi maka semakin baik pula kualitas laporan keuangan pemerintah daerah.
2. Pengawasan keuangan daerah berpengaruh signifikan positif terhadap kualitas laporan keuangan pada pemerintah daerah kota Padang. Di mana, semakin baik pengawasan keuangan daerah maka semakin baik pula kualitas laporan keuangan pemerintah daerah.

Saran Penelitian

Berdasarkan pada pembahasan dan kesimpulan di atas, maka peneliti menyarankan bahwa:

1. Dari hasil penelitian ini terlihat bahwa pemanfaatan teknologi informasi dan pengawasan keuangan daerah telah baik dilakukan, tapi masih ada beberapa hal yang belum sepenuhnya dilakukan dengan sempurna se-hingga hal ini berdampak pada kualitas laporan keuangan yang dihasilkan oleh pemerintah daerah. Pemerintah sebaiknya melakukan pengkajian ulang mengenai pemanfaatan teknologi informasi dan pengawasan keuangan daerah dalam pembuatan laporan keuangan agar mempunyai kualitas yang bagus.
2. Penelitian ini masih terbatas pada kapasitas pemanfaatan teknologi informasi dan pengawasan keuangan daerah dan terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah. Untuk penelitian selanjutnya dapat dilakukan perubahan variabel penelitian untuk menemukan variabel-variabel lain yang ber-engaruh.
3. Penelitian ini masih memiliki keterbatasan, yaitu pada metode penelitian yang dipakai. Untuk penelitian selanjutnya dapat dilakukan dengan berbagai macam metode, seperti wawancara langsung, metode survei lapangan, dll.

DAFTAR PUSTAKA

DAFTAR PUSTAKA

Arfianti, Dita. 2011. Analisis Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Nilai Informasi Pelaporan Keuangan Pemerintah Daerah Pada SKPD di Kabupaten

Batang. *Skripsi*. Fakultas Ekonomi Universitas Diponegoro

Fikri, Miftahul. 2011. Pengaruh Sistem Informasi Keuangan Daerah dan Pengawasan Keuangan Daerah terhadap Kualitas Laporan Keuangan Daerah pada Pemerintahan Kota Padang. *Skripsi*. Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Padang

Harifan, Handriko. 2009. Pengaruh Kapasitas Sumber Daya Manusia, Pemanfaatan Teknologi Informasi dan Pengendalian Intern Akuntansi terhadap Nilai Informasi Pelaporan Keuangan Pemerintah Daerah Pada SKPD Pemerintah Kota Padang. *Skripsi*. Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Padang

Indriasari, Desi. 2008. Pengaruh Kapasitas Sumber Daya Manusia, Pemanfaatan Teknologi Informasi dan Sistem Pengendalian Intern terhadap Nilai Informasi Pelaporan Keuangan Pemerintah Daerah. *Jurnal SNA*. Politeknik Negeri Sriwijaya Palembang

Kuncoro, Mudrajat. 2003. *Metode Riset Untuk Bisnis dan Ekonomi*. Jakarta: Erlangga

Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2015 Tentang Standar Akuntansi Pemerintahan.

Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 13 Tahun 2006 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah. Melalui <http://www.google.com> [29/11/2011]

- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 51 Tahun 2010 Tentang Pedoman Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah. Melalui <http://www.google.com> [29/11/2011]
- Sekaran, Uma. 2006. *Metodologi Penelitian Untuk Bisnis*. Jakarta: Salemba Empat
- Sugiyono. 2008. *Metode Penelitian Bisnis*. Bandung: Alfabeta
- Suwardjono. 2005. *Teori Akuntansi: Perekayasa Pelaporan Keuangan*. Edisi Ketiga. Yogyakarta: BPFE
- Tuasikal, Askam. 2007. Pengaruh Pengawasan, Pemahaman Sistem Akuntansi Keuangan dan Pengelolaan Keuangan terhadap Kinerja Unit Satuan Kerja Perangkat Daerah Pada Kabupaten dan Kota di Propinsi Maluku. *Jurnal Keuangandan Perbankan*. Vol. 10 No. 1 Hal. 66-82
- Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 Tentang Keuangan Negara. Melalui <http://www.google.com> [29/11/2011]
- Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah. Melalui <http://www.google.com> [29/11/2011]
- Wahyuni, Asnita. 2011. Pengaruh Penggunaan TI, Keahlian Pemakai dan Keterlibatan Pemakai terhadap Efektifitas Penerapan SIA. *Skripsi*. Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Padang
- Wahyono, Teguh. 2004. *Sistem Informasi Akuntansi: Analisis, Desain dan Pemograman Komputer*. Yogyakarta: Penerbit Andi
- Widjajanto, Nugroho. 2001. *Sistem Informasi Akuntansi*. Jakarta: Erlangga Sektor Publik
- Winidyaningrum. 2010. Pengaruh SDM dan Pemanfaatan TI Terhadap Keterandalan dan Ketepatanwaktuan Pelaporan Keuangan Pemda Dengan Variabel Intervening Pengendalian Intern Akuntansi. *Jurnal SNA*. STIE ST. Pignatelli: Surakarta

Hasil Uji Analisis

A. Deskriptif Statistik

Descriptive Statistics

	N	Minimum	Maximum	Mean	Std. Deviation
Pemanfaatan Teknologi Informasi	75	18	37	30,32	3,926
Pengawasan Keuangan Daerah	75	23	40	33,09	4,396
Kualitas Laporan Keuangan	75	32	50	40,89	3,253
Valid N (listwise)	75				

B. Uji Asumsi Klasik

1. Uji Normalitas Residual

One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test

		Unstandardized Residual
N		75
Normal Parameters ^{a,b}	Mean	,0000000
	Std. Deviation	2,60681203
Most Extreme Differences	Absolute	,074
	Positive	,063
	Negative	-,074
Test Statistic		,074
Asymp. Sig. (2-tailed)		,200 ^{c,d}

2. Uji Multikolinearitas

Coefficients^a

Model				Tolerance
1	Pemanfaatan Teknologi Informasi	1,000		
Model	Pengawasan Keuangan Daerah	1,000		1,071

		Collinearity Statistics	1,071
--	--	-------------------------	-------

a. Dependent Variable: Kualitas laporan keuangan pemerintah daerah

Pengujian Model

1. Uji F

ANOVA^a

Model		Sum of Squares	df	Mean Square	F
1 Regression	280,282	2	140,141	20,065	,000 ^b
Residual	502,865	72	6,984		
Total	783,147	74			

a. Dependent Variable: Y

b. Predictors: (Constant), X2, X1

2. Koefisien Determinasi

Model Summary

Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate
1	,598 ^a	,358	,340	2,643

A. Predictors: (Constant), X2, X1

B. Dependent Variable: Y